

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH MENGATASI KERUSAKAN  
LINGKUNGAN AKIBAT KONVERSI LAHAN MANGROVE  
BERDASARKAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
(Studi di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten  
Lampung Timur)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**DANNI PANGARIBOWO  
1926021004**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA PEMERINTAH DAERAH MENGATASI KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KONVERSI LAHAN MANGROVE BERDASARKAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Studi di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh

**DANNI PANGARIBOWO**

Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan yang menyebabkan abrasi di Kecamatan Labuhan Maringgai sudah terjadi sejak tahun 1990-an. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat konversi lahan mangrove berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan lingkungan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari berbagai aspek di dalam RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur yaitu aspek ekonomi, pemerintah tidak memiliki program dalam aspek ekonomi. Aspek sosial, pemerintah telah melakukan upaya sosialisasi tentang gerakan peduli lingkungan. dalam RENJA tersebut pemerintah memberikan upaya pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Pada aspek lingkungan, dalam mengatasi kerusakan lingkungan upaya pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur di lihat dari RENJA SKPD, pemerintah sudah membuat program dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

**Kata Kunci : Lingkungan, Pemerintah Daerah, Pembangunan Berkelanjutan**

## ABSTRACT

*LOCAL GOVERNMENT EFFORTS TO OVERCOME ENVIRONMENTAL  
DAMAGE DUE TO MANGROVE LAND CONVERSION BASED ON THE  
CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
(Study in Bandar Negeri Village Labuhan Maringgai Subdistrict, East Lampung  
Regency)*

*By*

DANNI PANGARIBOWO

*Environmental damage due to land use change that causes abrasion in Labuhan Maringgai District has occurred since the 1990s. The purpose of this study is to find out how the local government's efforts in overcoming environmental damage due to the conversion of mangrove land are based on the concept of sustainable development. The method used in this research is a qualitative research method. Collecting data using interviews, observation and documentation studies. The results of this study indicate that the efforts made by the local government in overcoming environmental damage based on the concept of sustainable development can be seen from various aspects in the RENJA of the Environmental Service of East Lampung Regency, namely the economic aspect, the government does not have a program in the economic aspect. Social aspect, the government has made socialization efforts about the environmental care movement. In the RENJA, the government provides environmental education efforts for the community through the movement to care and be cultured for the environment in schools. On the environmental aspect, in overcoming environmental damage, the local government's efforts through the East Lampung Regency Environmental Service are seen from the SKPD RENJA, the government has made programs and rehabilitation of coastal and marine ecosystems.*

*Keywords: Environment, Local Government, Sustainable Development*

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH MENGATASI KERUSAKAN  
LINGKUNGAN AKIBAT KONVERSI LAHAN MANGROVE  
BERDASARKAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN  
(Studi di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten  
Lampung Timur)**

Oleh  
**DANNI PANGARIBOWO**

Tesis  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**  
pada  
Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Tesis : **UPAYA PEMERINTAH DAERAH MENGATASI KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KONVERSI LAHAN MANGROVE BERDASARKAN KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Studi di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa : **DANNI PANGARIBOWO**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1926021004**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing

**Dr. Feni Rosalia, M.Si.**  
NIP 19690219 199403 2 001

**Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P.**  
NIP 19780430 200812 1 001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**  
NIP 19601010 198603 1 006

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua**

**Dr. Feni Rosalia, M.Si.**

**Penguji Utama**

**Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.**

**Sekretaris**

**Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos.,M.I.P.**

**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**

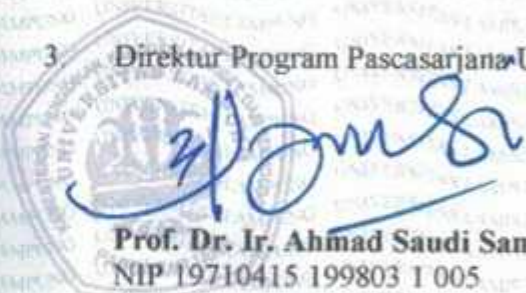
**NIP 19610807 198703 2 001**



**3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**

**Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T.,M.T.**

**NIP 19710415 199803 1 005**



**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 Maret 2022**

## PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik (Magister) baik di Indonesia maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.



npung, Maret 2022

**DANNI PANGARIBOWO**  
NPM. 1926021004

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis memiliki nama lengkap **DANNI PANGARIBOWO**. Lahir di Bogatama pada tanggal 06 November 1994 sebagai putra ke dua dari pasangan Bapak Suparjo dan Ibu Umi Lailatul Hidayah. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, memiliki seorang kakak laki-laki Wahyu Andika.

Penulis mengawali pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Sidoharjo lulus pada tahun 2001, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Sidoharjo lulus pada tahun 2007. Setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Penawartama lulus pada tahun 2010 kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Sribhawono lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana di Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan 16 Maret 2020 penulis mengabdikan diri sebagai Tenaga Kontrak Daerah Kabupaten Lamoung Timur di Bagian Pemerintahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur. Pada tanggal 16 Maret 2020 penulis mengalami kecelakaan dan mengakibatkan cacat fisik pada bagian jari tangan.



**MOTTO**

**SABAR, IKLAS DAN SEMANGAT !!!  
SEMUA AKAN BAIK-BAIK SAJA**

**(DANNI PANGARIBOWO)**

## SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun Tesis yang berjudul **“Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Konversi Lahan Mangrove Berdasarkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Studi Di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan tesis ini antara lain teman – teman Magister Ilmu Pemerintahan. Semoga Allah selalu memberkahi kalian.

Kedua Orang Tuaku, Ibu Umi Lailatul Hidayah sosok perempuan luar biasa yang mempersembahkan seluruh hidupnya untuk keluarga. Sampai kapanpun tidak akan pernah ada yang mampu menggantikanmu. Terima kasih untuk setiap cinta dan kasih sayang, yang telah ibu curahkan kepada kami. Bapak Suparjo ayahku tecinta terima kasih telah mencintaiku dengan cara ayah sendiri.

Kedua Kakak ku, Kak Wahyu Andika dan Istrinya Kak Eri terima kasih untuk cinta dan kasih sayang serta doa untuk saya.

Sepupu dan Teman – teman ku, Novi Kurniawati, Sandi, Rista, Galang, Aziz, Irma, Alfian, Lia, Fadil dan Soni Galuh, Regi Yudistira, Liveno Resgi, Ahmad Muhlisin, Rio Setiawan, Surya Aji, Hendi Prayetno, Alfian Dwi Ramadhani, Elsa Tiara Fadilla dan Luki Desmawati (calon istri) terimakasih untuk semangatnya.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T.,M.T.selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si.,Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si selaku pembimbing utama yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi tersusunnya tesis ini;
6. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos.,M.I.P Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesisi ini;
7. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Seluruh Dosen dan Staff Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan;
9. Seluruh informan;
10. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 2018;
11. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Maret 2022  
Penulis,

**DANNI PANGARIBOWO**  
NPM 1926021004

## DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                       |         |
| <b>ABSTRAK</b>                             |         |
| <b>ABSTRACT</b>                            |         |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                    | i       |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                  | ii      |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                 | iii     |
| <br>                                       |         |
| <b>I. PENDAHULUAN</b>                      |         |
| A. Latar Belakang Masalah.....             | 1       |
| B. Rumusan Masalah.....                    | 10      |
| C. Tujuan Penelitian.....                  | 11      |
| D. Manfaat Penelitian.....                 | 11      |
| <br>                                       |         |
| <b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>                |         |
| A. Lingkungan Hidup.....                   | 12      |
| B. Alih Fungsi Lahan .....                 | 14      |
| C. Mangrove .....                          | 18      |
| D. Pemerintah Daerah .....                 | 21      |
| E. Konsep Pembangunan Berkelanjutan .....  | 24      |
| F. Kerangka Pikir.....                     | 26      |
| <br>                                       |         |
| <b>III. METODE PENELITIAN</b>              |         |
| A. Tipe Penelitian.....                    | 29      |
| B. Fokus Penelitian.....                   | 29      |
| C. Lokasi .....                            | 30      |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....            | 31      |
| E. Teknik Pengolahan Data.....             | 32      |
| F. Teknik Analisis Data.....               | 33      |
| G. Teknik Keabsahan Data.....              | 34      |
| <br>                                       |         |
| <b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> |         |
| A. Kabupaten Lampung Timur.....            | 36      |
| B. Kecamatan Labuhan Maringgai.....        | 39      |
| C. Desa Bandar Negeri .....                | 40      |

|            |  |    |
|------------|--|----|
| <b>V.</b>  | <b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b>  |    |
|            | A. Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan .....   | 43 |
|            | B. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi<br>Kerusakan Lingkungan Akibat Konversi Lahan<br>Mangrove Berdasarkan Konsep Pembangunan<br>Berkelanjutan ..... | 54 |
|            | 1. Aspek Ekonomi .....   | 60 |
|            | 2. Aspek Sosial .....  | 67 |
|            | 3. Aspek Lingkungan .....  | 73 |
| <b>VI.</b> | <b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>  |    |
|            | A. Kesimpulan.....   | 78 |
|            | B. Saran.....  | 79 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

| Tabel   | Halaman |
|---|---------|
| 1. Luas dan Kondisi Hutan Mangrov di Provinsi Lampung.....                  | 3       |
| 2. Perubahan Luasan Tutupan Hutan Mangrove Di Labuhan Maringgai.....        | 4       |
| 3. Luas Hutan Mangrove Di Kecamatan Labuhan Maringgai Tahun 2018-2020 ..... | 5       |
| 4. Informan .....   | 29      |
| 5. Jumlah Desa yang Memiliki Fasilitas Sekolah .....                        | 65      |

**DAFTAR GAMBAR**

| Gambar   | Halaman |
|--|---------|
| 1. Abrasi Pantai .....                                 | 6       |
| 2. Kerangka Fikir .....                                | 26      |
| 3. Garis Pantai di Kabupaten Lampung Timur .....       | 53      |
| 4. Lokasi Mangrov per-desa .....                       | 58      |
| 5. Mangrov dan tambak .....                            | 58      |
| 6. Tambak Terakhir Yang Berdampingan Dengan Laut ..... | 59      |
| 7. Abrasi Yang Merusak Tambak .....                    | 61      |
| 8. Tambak di Desa Bandar Negeri .....                  | 72      |
| 9. Kerusakan Mangrove .....                            | 73      |

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan alamnya baik hutan, gunung, lautan, samudra dan kekayaan alam tambangnya. Selama kurun waktu satu dekade belakangan ini, Indonesia selalu ditimpa oleh bencana alam, baik itu banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan karena musim kemarau yang begitu panjang. Ibu kota Jakarta pun sangat sering menjadi korban kegenasan alam dengan misalnya banjir parah seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Banyaknya bencana alam yang menimpa Indonesia itu, memunculkan banyak asumsi, diantaranya ialah bahwa mutu lingkungan hidup Indonesia sangat jauh dari kata baik. Gundulnya kawasan hutan yang menjadi kawasan penyangga daerah kota, banyaknya kawasan hutan yang diubah peruntukannya untuk lahan perkebunan, dinilai banyak pihak sebagai biang kerok terjadinya bencana alam di mana-mana.

Banyak pihak yang menuding ketidakpedulian manusia terhadap alam, menyebabkan munculnya bencana alam itu. Rakusnya manusia yang mengeksplorasi sumber daya alam tanpa kendali sehingga membuat rusak ekosistem alam. Bahkan sejak lama masalah lingkungan hidup mendapat perhatian serius, terutama ketika eksploitasi lingkungan hidup dilakukan secara berlebihan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan berimbas kepada ekosistem (Azra, 2010:2).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada disekitar kita. Lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan ruang dengan



segala benda dan makhluk hidup di dalamnya. Termasuk juga manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Masalah lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup (Zoer'aini, 2009:103). Hal ini disebabkan karena manusia memerlukan daya dukung unsur-unsur lingkungan untuk kelangsungan hidupnya. Udara, air, makanan, sandang, papan dan seluruh kebutuhan manusia harus diambil dari lingkungan hidupnya. Namun semakin banyaknya suatu penduduk di suatu tempat mengakibatkan merosotnya pemeliharaan lingkungan hidup pada saat ini dan yang terjadi adalah kerusakan lingkungan.

Wilayah Pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Wilayah pesisir memainkan peran yang cukup penting bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir (Fabianto, 2014:3).

Perubahan yang terjadi pada wilayah pesisir tidak hanya sekedar gejala alam semata, tetapi kondisi ini sangat besar dipengaruhi oleh aktifitas manusia yang ada di sekitarnya. Wilayah pesisir merupakan wilayah pintu gerbang bagi berbagai aktifitas pembangunan manusia dan sekaligus menjadi pintu gerbang dari berbagai dampak dari aktifitas tersebut. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang pertama kali dan paling banyak menerima tekanan dibandingkan dengan wilayah lain. Tekanan tersebut muncul dari aktivitas pembangunan seperti pembangunan permukiman dan aktivitas perdagangan karena wilayah pesisir paling rentan terhadap perubahan baik secara alami ataupun fisik sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan (Asyiwati, 2020:2).

Perubahan dalam hal ini disebut juga dengan alih fungsi lahan. Alih Fungsi Lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain misalnya dari hutan mangrove ke lahan tambak udang. Peta Mangrove Nasional 2019 menunjukkan luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3,31 juta hektare, dengan 2,7 juta hektare dalam kondisi bagus dan 637.624 ha memiliki kerapatan jarang<sup>1</sup>. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2018, laju kerusakan hutan mangrove seluas 58 ribu hektare per tahun. Angka ini merupakan lajur kerusakan tercepat di dunia. Data KLHK menyebut faktor utama kerusakan mangrove adalah alih fungsi menjadi lahan pertanian, tambak udang, dan pembangunan infrastruktur<sup>2</sup>.

Lampung merupakan provinsi yang memiliki luasan hutan mangrove ke tiga terkecil di Sumatera. Hutan mangrove di Lampung berada di sepanjang 896 km dari total panjang pantai sepanjang 1.105 km. Keberadaan hutan mangrove yang menutupi sekitar 81% pantai Lampung ini dapat memberikan berbagai manfaat, di antaranya ialah sebagai stabilisator kondisi pantai, mencegah terjadinya abrasi dan intrusi air laut, sebagai sumber keanekaragaman biota akuatik dan non akuatik, sebagai sumber bahan yang dapat dikonsumsi masyarakat dan lain sebagainya (Yuliasamaya, 2014:2).

Tabel 1. Luas dan Kondisi Hutan Mangrov di Provinsi Lampung

| Keterangan         | Luas dan Kondisi Hutan Mangrov |        |        |       |       |        |
|--------------------|--------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
|                    | 2010                           | 2011   | 2012   | 2013  | 2014  | 2015   |
| Luas (Ha)          | 19.596                         | 22.724 | 21.644 | 2.537 | 2.537 | 17.110 |
| Kondisi Baik (%)   | -                              | 21     | 53     | 66    | 66    | 29     |
| Kondisi Sedang (%) | -                              | 13     | 11     | 19    | 19    | 18     |
| Kondisi Rusak (%)  | -                              | 66     | 36     | 15    | 15    | 54     |

Sumber : BPS Provinsi Lampung

<sup>1</sup> <https://www.forestdigest.com/detail/693/mangrove-antara-tambak-udang-dan-kelestarian>, diakses pada tanggal 18 Februari 2021, pukul 22:00 WIB.

<sup>2</sup> <https://www.forestdigest.com>, diakses tanggal 19 Februari 2021, pukul 21:00 WIB.

Berdasarkan tabel di atas luas mangrove mengalami beberapa kondisi kenaikan dan penurunan luasan hutan mangrove. Pada tahun 2011 kondisi luasan bertambah dibandingkan tahun 2010. Tahun 2012 mengalami penurunan seluas 1.080 Ha. Sedangkan ditahun 2013-2014 jumlah luasan hutan mangrove terhitung sama, namun ditahun ini lah penurunan luasan mangrove dari tahun 2012 sangat banyak yaitu 19.107 Ha. Luas hutan mangrove naik ditahun 2015 sebanyak 14.573 Ha.

Menurut BPS Provinsi Lampung (2015), Kabupaten Lampung Timur merupakan wilayah terluas di Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Timur memiliki wilayah pesisir yang terluas di Provinsi Lampung karena dilalui oleh garis pantai timur. Wilayah pesisir yang memiliki luas wilayah pesisir terbesar yaitu wilayah pantai timur dengan luas 270.000 ha. Wilayah pantai timur atau pesisir timur melintasi Kabupaten Lampung Timur yang meliputi Kecamatan Sukadana, Way Kambas, Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Way Bungur, dan Way Jepara.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan, pantai timur Lampung mengalami abrasi di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Kenaikan permukaan laut tersebut mengakibatkan abrasi pantai yang berada di wilayah pantai timur Lampung. Selain karena naiknya air laut, minimnya mangrove juga salah satu penyebab adanya abrasi di wilayah pantai timur Lampung. Menurut catatan Walhi, setiap tahunnya kenaikan air laut meningkat hingga mengancam wisata dan tambak di Provinsi Lampung<sup>3</sup>.

Adapun kerusakan hutan mangrove mencapai 48%. Kawasan pesisir sepanjang pantai Lampung Timur, hampir seluruh bagiannya telah diubah dari rawa-rawa dan hutan mangrove menjadi lahan pertanian padi dan tambak udang windu. Adapun tambak-tambak tersebut di antaranya terdiri atas sebagian besar tambak tradisional, dan sisanya adalah tambak semi-intensif dan intensif. Konversi lahan tersebut diawali dari pinggir pantai, kemudian dilanjutkan dengan konversi lahan yang menuju ke arah daratan (Yuliasamaya, 2014:2).

---

<sup>3</sup> lampung.idntimes.com, diakses pada tanggal 19 Februari 2021, pukul 22:00 WIB.

Tabel 2. Luasan Hutan Mangrove Di Labuhan Maringgai

| No | Tahun | Luas Tutupan | Besar Perubahan |
|----|-------|--------------|-----------------|
| 1  | 1973  | 2.373,29 ha  | -               |
| 2  | 1983  | 1.826,48 ha  | -23,04%         |
| 3  | 1994  | 626,67 ha    | -65,69%         |
| 4  | 2004  | 719,35 ha    | +14,79%         |
| 5  | 2013  | 1.166,21 ha  | +62,12%         |

Sumber: Yuliasamaya (2014:6)

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, tampak bahwa perubahan luasan tutupan mangrove cenderung terus menurun pada rentang tahun 1973 ke tahun 1994, kemudian meningkat hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 kenampakan tutupan mangrove menunjukkan perbedaan yang sangat jelas dibandingkan pada tahun 1973. Adapun penurunan luasan tutupan mangrove di Labuhan Maringgai selama rentang tahun 1973 ke tahun 1994 terjadi seiring dengan adanya beberapa faktor yang terjadi di lokasi setempat. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah munculnya masyarakat pendatang. Masyarakat membuka hutan mangrove untuk dijadikan tambak udang tradisional. Terdapat program transmigrasi di daerah pesisir setempat (Yuliasamaya, 2014:6).

Tabel 3. Luas Hutan Mangrove di Labuhan Maringgai Tahun 2018 - 2020

| No | Klarifikasi            | Lokasi           |                   | Luas (Ha)     |
|----|------------------------|------------------|-------------------|---------------|
|    |                        | Desa             | Kecamatan         |               |
| 1  | Di Luar Kawasan Hutan  | Margasari        | Labuhan Maringgai | 700           |
|    |                        | Sriminosari      | Labuhan Maringgai | 200           |
|    |                        | Muara Gading Mas | Labuhan Maringgai | 300           |
| 2  | Di Dalam Kawasan Hutan | Bandar Negeri    | Labuhan Maringgai | Belum Terdata |
|    |                        | Karya Makmur     | Labuhan Maringgai | Belum Terdata |
|    |                        | Karya Tani       | Labuhan Maringgai | Belum Terdata |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, luas hutan mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai tahun 2018 - 2020 yaitu seluas 1.200 Ha. Luas 1.200 Ha tersebut berada ditiga desa (Margasari, Sriminosari dan Muara Gading Mas). Terdapat tiga desa yang belum terdata luas hutan mangrove tahun 2018 - 2020, yaitu Desa Bandar Negeri, Karya Makmur dan Karya Tani. Pengurangan areal hutan mangrove di

Kecamatan Labuhan Maringgai menyebabkan suatu perubahan negatif pada kondisi lingkungan, ekonomi dan biologis areal hutan mangrove Labuhan Maringgai. Pada kondisi lingkungan terjadi intrusi dan abrasi yang semakin meningkat radius terjadinya dari garis pantai khususnya dalam kurun waktu 1995-2004 menjadi 80m-200m (Vika, 2005:3).

Pada tahun 2007 rusaknya hutan bakau akibat pembukaan Tambak di sepanjang pesisir timur Lampung membuat abrasi pantai semakin parah. Garis pantai sejumlah kecamatan di Pesisir ini naik 300 - 700 meter ke darat. Kondisi tersebut diperparah dengan besarnya gelombang akibat musim timur yang terjadi selama April sampai Oktober. Kondisi terparah ada di Labuhan Maringgai nelayan setempat sudah mengungsi ke daratan yang lebih tinggi<sup>4</sup>. Pada tahun 2020 telah terjadi abrasi di wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai. Dampak pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak (Abrasi), belasan hektare tambak di Desa Bandar Negeri, tersapu gelombang dan mengakibatkan tambak-tambak tersebut tidak lagi produktif. Luas hutan mangrove di Desa Bandar Negeri tahun 2014 adalah 50 Ha (sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2014)<sup>5</sup>.



Gambar 1. Abrasi Pantai

---

<sup>4</sup> <https://koran.tempo.co/read/nusa/110347/abrasi-pantai-timur-lampung-semakin-parah>, diakses pada tanggal 19 Februari 2021, pukul 23:00 WIB.

<sup>5</sup> Kupastuntas.com, diakses pada tanggal 19 Februari 2021, pukul 23:00 WIB.

Abrasi atau erosi adalah kerusakan garis pantai akibat dari terlepasnya material pantai, seperti pasir atau lempung yang terus menerus di hantam oleh gelombang laut atau dikarenakan oleh terjadinya perubahan keseimbangan angkutan sedimen di perairan pantai atau hilangnya daratan di wilayah pesisir, sedangkan akresi atau sedimentasi adalah timbulnya daratan baru di wilayah pesisir. Fenomena abrasi maupun akresi disebabkan oleh faktor alami dan manusia. Proses-proses alami dapat berupa proses hidro-oseanografi, dari laut misalnya akibat hempasan gelombang, perubahan pola arus, angin dan fenomena pasang surut yang kesemuanya dapat menyebabkan abrasi pantai. Disamping itu, kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global semakin memperparah kondisi perairan pantai. Pemanasan global merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca (greenhouse effect) yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas seperti karbondioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), dinitrooksida (N<sub>2</sub>O) dan CFC sehingga panas dari energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi (Munandar 2017:3)

Survey membuktikan setidaknya ada 5 penyebab abrasi yang disebabkan oleh kegiatan manusia (antropogenik) yang berpotensi menimbulkan perubahan garis pantai, yaitu (Munandar 2017:4):

1. Terperangkapnya angkutan sedimen sejajar pantai akibat bangunan buatan seperti groin, jetty, breakwater pelabuhan dan reklamasi yang sejajar garis pantai.
2. Timbulnya perubahan arus akibat adanya bangunan di pantai.
3. Berkurangnya suplai sedimen dari sungai akibat penambangan pasir, dibangunnya dam di sebelah hulu sungai dan sudetan (pemindahan arus sungai).
4. Penambangan pasir di perairan pantai, yang dapat mengakibatkan perubahan kedalaman sehingga merubah pola arus dan gelombang pecah.
5. Pengambilan pelindung pantai alami, yaitu penebangan hutan mangrove dan pengambilan terumbu karang.

Perubahan garis pantai merupakan salah satu bentuk dinamisasi kawasan pantai yang terjadi secara terus menerus. Pantai di Desa Bandar Negeri rentan terhadap pergerakan sedimen yang memberi dampak pada mundurnya garis pantai (abrasi) dan majunya garis pantai (akresi). Pergerakan sedimen memberikan dampak terhadap perubahan geomorfologi, ketidakstabilan ekologi, dan kerusakan bangunan di sekitar pantai. Abrasi merupakan salah satu masalah yang mengancam kondisi pesisir, yang dapat merusak dan mengancam bangunan-bangunan yang berbatasan langsung dengan air laut, seperti tambak.

Kerusakan lahan di pesisir Kabupaten Lampung Timur akibat alih fungsi lahan membuat berbagai pihak harus melakukan berbagai upaya penanggulangan, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Bencana alam akan sering terjadi jika tidak adanya penanggulangannya. Hal tersebut menyebabkan kesejahteraan masyarakat menjadi terancam. Pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah dalam hal ini menjaga kesejahteraan sosial daerahnya dari masalah seperti kemiskinan, ketimpangan dan bencana alam. Pemerintah daerah menjaga kesejahteraan social dengan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan. Menurut Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan mendefinisikan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Fauzi, 2004:28).

Begitu juga jika mengacu pada peran pemerintah daerah sesuai lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada aspek pengelolaan lingkungan, sudah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk mengelola keberlanjutan lingkungan agar terus memegang prinsip wawasan lingkungan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan mendukung regulasi tersebut untuk mampu menganalisa dari sudut pandang kesejahteraan masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Sebab, kerusakan yang disebabkan alih fungsi lahan berpotensi merusak sumber daya yang ada dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar.

Peraturan tentang lingkungan hidup di Provinsi Lampung sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Pada Pasal 7, tujuan pembangunan lingkungan, yaitu rehabilitasi, revitalisasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan.

Sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang lingkungan pesisir diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Rehabilitasi Pesisir, Pantai Dan Laut Dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur. Pada Pasal 2, rehabilitasi pantai bertujuan untuk mengembalikan fungsi pantai sebagaimana mestinya dan menjamin kelestarian pesisir. Sehingga pantai dan laut sesuai dengan fungsi dan peruntukannya serta menjamin peningkatan pendapatan masyarakat.

Sebagai bahan referensi atas penelitian ini, maka peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu. Jurnal yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan. Penelitian pertama oleh Ayub Ricardo dengan judul “Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat 2016”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan.



Penelitian kedua oleh Hanif Rachmad Fauzie dengan judul “Peran Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan di Kabupaten Sidoarjo 2018”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah, dengan menggunakan teori politik hijau, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami penerapan politik hijau dalam implementasi kebijakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Penelitian ketiga oleh Arinta Dewi Putri dengan judul “Kerusakan Lingkungan Akibat Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan 2018”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan dan perundangan yang berlaku mengenai perlindungan terhadap lingkungan dan kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan apa yang telah diulas pada penelitian terdahulu mengenai kerusakan lingkungan. Terdapat persamaanya peneliti sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya yaitu peneliti menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan untuk melihat pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat alih fungsi lahan. Sehingga penelitian ini mengangkat judul “Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Konversi Lahan Mangrove Berdasarkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat konversi lahan mangrove berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat konversi lahan mangrove berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi atau pemikiran yang positif berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan pada konsep pembangunan berkelanjutan, lebih khusus Ilmu Pemerintahan.

2. Secara praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan terkait pentingnya menjaga lingkungan.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta memberikan inspirasi terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Lingkungan Hidup

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Terkait dengan kajian masalah lingkungan hidup, banyak para ahli memberikan definisi atau arti mengenai lingkungan hidup. Tentunya mereka mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki. Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*) (Mulyanto, 2007:22). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain (Soegianto, 2010:22).

Manusia bersama hewan, tumbuhan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk hidup tersebut (Soemarwoto, 2001:28). Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita (Daud, 2001:16). Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *millieu* dan dalam bahasa Prancis disebut dengan *environment*. Menurut Munadjat

Danusaputro, “Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidupnya (Siahaan, 2004:16).

Namun, pada hakikatnya keseimbangan alam (*balance of nature*) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia mempunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastic (Soegianto, 2010:22).

Menyimpulkan dari pengertian di atas, suatu lingkungan hidup dikatakan dalam keadaan serasi apabila selama interaksi manusia dengan berbagai komponen lingkungan lainnya berada dalam batas-batas keseimbangan atau dapat pulih seketika dalam keadaan seimbang, tetapi jika timbul ketergangguan antara interaksi manusia dengan lingkungannya disebabkan batas-batas kemampuan salah satu komponen lingkungan sudah terlampaui, sehingga akibatnya tidak dapat lagi menjalankan fungsinya, maka lingkungan sudah menjadi tidak seimbang lagi, di sinilah timbul apa yang disebut dengan masalah lingkungan.

Kerusakan lingkungan akan selalu dibarengi dengan tercemarnya suatu lingkungan. Kerusakan lingkungan sendiri adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh manusia yang menimbulkan hilangnya karakteristik baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat yang dimiliki, sehingga terlampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup. Rusaknya suatu kondisi lingkungan memiliki makna bahwa menurunnya tingkat kegunaan untuk pemanfaatam tertentu bahkan bisa tidak digunakan sama sekali. Faktor yang menyebabkan rusaknya lingkungan ini disebabkan oleh dua hal, yaitu manusia dan alam (Subagyo, 2002:23).

Kerusakan lingkungan bisa menimbulkan suatu bencana seperti longsor, banjir. Hal ini terjadi karena adanya alih fungsi lahan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, yang dimana tidak dilakukannya upaya reboisasi atau revegetasi. Perusakan lingkungan apabila dilihat dari peristiwa terjadinya, yaitu: (a) Disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia; (b) Disebabkan oleh pencemaran, baik air, udara maupun tanah (Subagyo, 2002:23).

## **B. Konsep Kerusakan Lingkungan**

Sesungguhnya sumber yang menimbulkan permasalahan lingkungan ialah ulah manusia yang dalam aktivitasnya tidak memedulikan keseimbangan dan keselarasan lingkungan. Manusia yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya akan melampaui kemampuan lingkungan dalam mendukung perikehidupan. Aktivitas berupa eksploitasi yang berlebihan itulah yang menyebabkan terganggunya keseimbangan dan keserasian lingkungan . Tidak jarang terjadi manusia yang melakukan tindakan over eksploitasi karena didorong oleh motivasi untuk mencari keuntungan materi (Pande, 2004:100).

Faktor penyebab kerusakan lingkungan hidup dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu faktor alam dan faktor manusia (Yosef, 2013:6)

### a) Kerusakan lingkungan hidup akibat faktor alam

Bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. Yaitu peristiwa alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain; letusan gunung berapi, gempa bumi, angin topan, banjir, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa alam tersebut yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup.

### b) Kerusakan lingkungan hidup akibat faktor manusia

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup, yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran

akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Manusia merupakan salah satu kategori faktor yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

#### 1. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan

Pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan atau kurang bijaksana akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan hidup. Kemajuan teknologi produksi dalam eksploitasi atau penambangan batu bara, minyak bumi, bijih besi, emas, timah, bauksit, dan sumber daya alam lainnya, telah mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Eksploitasi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan bentang alam, meningkatnya frekuensi tanah longsor, terbentuknya terowongan, waduk atau genangan air yang tidak dikehendaki, serta gangguan terhadap kehidupan satwa liar. Pengolahan, pengangkutan, dan proses lebih lanjut bahan yang dieksploitasi itu juga akan mencemari tanah, air, dan udara.

#### 2. Industrialisasi

Sejak revolusi industri, kebutuhan akan produk-produk yang dibutuhkan manusia kian meningkat. Pada awalnya, kebutuhan untuk menggerakkan mesin-mesin industri digunakan kayu sebagai bahan bakar. Untuk itu maka penggundulan hutan tidak bisa dihindari. Hal tersebut diperparah lagi, karena tidak diimbangi dengan penerapan reboisasi yang baik, dan kondisi tersebut masih berlangsung hingga sekarang. Dengan ditemukan mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar minyak bumi lebih mempercepat proses industrialisasi.

Percepatan proses industrialisasi juga berpengaruh dengan meningkatnya eksplorasi minyak bumi. Seiring dengan meningkatnya proses industrialisasi, berdampak pada pencemaran terhadap lingkungan seperti:

- a. Pencemaran udara
- b. Pencemaran air
- c. Kebisingan

Industri kimia dan industri yang menggunakan bahan-bahan kimia merupakan salah satu jenis industri yang berpotensi untuk mencemari lingkungan. Hal tersebut dapat terjadi karena limbahnya tidak dapat dengan mudah didegradasi dibandingkan dengan senyawa-senyawa lainnya.

### 3. Transportasi

Transportasi pada akhirnya merupakan tuntutan dan bukan sekedar keinginan. Transportasi dibutuhkan untuk mendukung mobilitas penduduk dari tempat tinggal ke tempat kerja atau dari satu tempat ke tempat lain. Ketika tuntutan transportasi menjadi cukup tinggi, peluang terjadinya polusi udara dan emisi juga meningkat. Terlebih bahan bakar adalah jenis sumber daya tidak terbarui sehingga apabila tidak ada kepedulian dalam penggunaannya, kemungkinan punah akan sangat besar.

### 4. Sampah

Sampah yang dibuang di sembarang tempat dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain menimbulkan penyumbatan pada saluran drainase dan saluran air hujan sehingga mengakibatkan banjir, mencemari lingkungan, mengganggu kesehatan dan menjadi sumber penyakit serta dampak negatif lainnya.

Menurut Dahuri dalam (Akhmad, 2011:64) mendefinisikan alih fungsi lahan sebagai sebuah mekanisme yang mempertemukan permintaan dan penawaran terhadap lahan dan menghasilkan kelembagaan lahan baru dengan karakteristik sistem produksi. Utomo, dkk. (1992:15) mendefinisikan alih fungsi lahan adalah berubahnya pemanfaatan suatu lahan dari pemanfaatan sebelumnya yang menyebabkan dampak negatif terhadap potensi yang dimiliki oleh lahan tersebut sebelum dialih fungsikan. Dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan adalah perubahan pemanfaatan lahan dari satu fungsi ke fungsi yang lain sesuai dengan manfaat tertinggi yang diberikan kepada pemilik lahan.

Menurut Ani (2012:53) Alih fungsi lahan dapat bersifat permanen dan dapat bersifat sementara. Menurut Ilham, dkk. (2005:7), faktor penentu terjadinya alih fungsi lahan adalah faktor ekonomi, sosial, dan peraturan pertanahan. Alih fungsi dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan penduduk, perkembangan perekonomian yang cepat, dan kemiskinan Giri (dalam Willson, 2006:227). Petani mengalihfungsikan lahan karena hasil pertanian tidak mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatnya harga tanah. Pemilik lahan akan mengalihfungsikan lahan ketika sektor yang lain memberikan keuntungan yang lebih banyak. Persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan non pertanian menyebabkan alih fungsi lahan (Iqbal M, 2007:5).

Menurut Arsyad dan Rustiadi (2008:78) konversi lahan merupakan konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk serta proses pembangunan lainnya. Konversi lahan pada tahap tertentu wajar terjadi, namun pada sisi lain jika tidak dikendalikan maka akan semakin bermasalah karena umumnya alih fungsi terjadi di atas lahan pertanian yang masih produktif. Menurut Hayono (2009:17), pengertian konversi, alih fungsi atau mutasi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumber daya lahan dari suatu penggunaan ke penggunaan lainnya. Namun sebagai suatu terminologi dalam kajian land economics, pengertiannya terutama difokuskan pada proses dialihgunakannya lahan, dari lahan pertanian atau perdesaan ke penggunaan non-pertanian. Proses alih fungsi lahan ini melibatkan baik reorganisasi struktur fisik kota secara internal maupun ekspansinya ke arah luar kota.

Menurut Pierce (1981:110), konsumsi terhadap lahan merupakan manifestasi dari kekuatan-kekuatan demografis dan ekonomi. Selain kedua kekuatan ini memberikan dorongan terhadap konversi lahan, sejumlah faktor lain juga memberikan pengaruhnya. Dari banyak faktor yang mungkin, terdapat tujuh variabel yang secara konseptual berpengaruh, yaitu perubahan penduduk, fungsi ekonomi yang dominan, ukuran kota, rata-rata nilai lahan residensial, kepadatan penduduk, wilayah geografis, dan kemampuan lahan untuk pertanian.



Pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik (Fitrianingsih, 2017:16).

Menurut Bambang Irawan dan Supena Friyatno, Pada tingkatan mikro, proses alih fungsi lahan pertanian (konversi lahan) dapat dilakukan oleh petani sendiri atau dilakukan oleh pihak lain. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kapasitas produksi pangan karena proses alih fungsi lahan tersebut biasanya mencakup hamparan lahan yang cukup luas, terutama ditujukan untuk pembangunan kawasan perumahan. Proses alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut biasanya berlangsung melalui dua tahapan (Dinaryanti, 2014:13) yaitu:

- a. Pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak lain
- b. Pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan non pertanian

### **C. Mangrove**

Menurut Irmala, Kata mangrove merupakan kombinasi antara kata mangue yang berarti tumbuhan dan grove yang berarti belukar atas hutan kecil. Kata mangrove digunakan untuk menyebut jenis pohon-pohon atau semak-semak yang tumbuh di antara batas air tinggi saat air pasang dan batas air terendah di atas rata-rata permukaan air dalam (Nurfadilah, 2017:6). Hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang air laut tetapi tidak terpengaruh oleh iklim. Sedangkan daerah pantai adalah daratan yang terletak di bagian hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berbatasan dengan laut dan masih dipengaruhi oleh pasang surut, dengan kelerengan kurang dari 8% (Nufadilah, 2017:7).

Ekosistem mangrove adalah suatu sistem di alam tempat berlangsungnya kehidupan yang mencerminkan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya dan diantara makhluk hidup itu sendiri, terdapat pada wilayah pesisir, terpengaruh pasang surut air laut, dan didominasi oleh spesies pohon atau semak yang khas dan mampu tumbuh dalam perairan asin/payau (Nufadilah, 2017:8). Fungsi Ekologi dan Ekonomi Ekosistem Mangrove :

#### 1. Fungsi Ekologi Hutan Mangrove

Secara ekologis mangrove memegang peranan kunci perputaran nutrien atau unsur hara pada perairan pantai dan sekitarnya yang dibantu oleh pergerakan pasang surut air laut. Interaksi vegetasi mangrove dengan lingkungannya mampu menciptakan kondisi iklim yang sesuai untuk proses biologi beberapa organisme akuatik, yang termasuk sejumlah besar mikro organisme dan makro organisme. Dengan demikian, di mana terdapat mangrove berarti di situ juga merupakan daerah perikanan yang subur, karena terdapat hubungan positif dan signifikan antara hutan mangrove dengan tingkat produksi perikanan.

Nilai penting mangrove lainnya adalah dalam bentuk fungsi ekologisnya sebagai stabilisator tepian sungai dan pesisir dan memberikan dinamika pertumbuhan di kawasan pesisir, seperti pengendalian erosi pantai, menjaga stabilitas sedimen dan bahkan turut berperan dalam menambah perluasan lahan daratan (*land building*) dan perlindungan garis pantai (*protected agent*). Bahkan dapat juga berperan penting dalam memfungsikan ekosistem sekitarnya, termasuk tanah-tanah basah pesisir, terumbu karang, dan lamun.

Fungsi dan manfaat hutan mangrove telah banyak diketahui, baik sebagai tempat pemijahan ikan di perairan, pelindung daratan dari abrasi oleh ombak, pelindung daratan dari tiupan angin, penyaring intrusi air laut ke daratan dan kandungan logam berat yang berbahaya bagi kehidupan, tempat singgah migrasi burung; dan sebagai habitat satwa liar serta manfaat langsung lainnya bagi manusia. Hutan mangrove mampu mengikat sedimen yang terlarut dari

sungai dan memperkecil erosi atau abrasi pantai, mangrove juga mampu dalam menekan laju intrusi air laut ke arah daratan. Mangrove juga memiliki fungsi ekologis sebagai habitat berbagai jenis satwa liar. Keanekaragaman fauna di hutan mangrove cukup tinggi, secara garis besar dapat dibagi dua kelompok, yaitu fauna akuatik seperti ikan, udang, kerang, dan lainnya serta kelompok terestrial seperti insekta, reptilia, amphibia, mamalia, dan burung.

## 2. Fungsi Ekonomi Hutan Mangrove

Ekosistem mangrove, selain mempunyai fungsi ekologis, juga mempunyai potensi dan manfaat ekonomi yang sangat besar. Ekosistem mangrove memberi kontribusi secara nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat, devisa untuk daerah, dan negara. Produk yang diperoleh dari ekosistem mangrove berupa kayu bakar, bahan bangunan, pupuk, bahan baku kertas, bahan makanan, obat-obatan, minuman, peralatan rumah tangga, bahan baku tekstil dan kulit, lilin, madu, rekreasi, tempat pemancingan, dan lain-lain.

Secara garis besar mangrove mempunyai beberapa keterkaitan dalam pemenuhan kebutuhan manusia sebagai penyedia bahan pangan, papan dan kesehatan serta lingkungan. Secara ekonomi hutan mangrove yaitu, (Nufadilah, 2017:11):

- a. Penghasil kayu, misalnya kayu bakar, arang serta kayu untuk bahan bangunan dan perabot rumah tangga.
- b. Penghasil bahan baku industri, misalnya pulp, kertas, tekstil, makanan, obat-obatan, alkohol, penyamak kulit, kosmetik dan zat pewarna.
- c. Penghasil bibit ikan, udang, kerang, telur burung dan madu.
- d. Sebagai objek pariwisata, karakteristik hutannya yang berada di peralihan antara darat dan laut memiliki keunikan dalam beberapa hal. Kegiatan wisata ini di samping memberikan pendapatan langsung bagi pengelola melalui penjualan tiket masuk dan parkir, juga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat di sekitarnya dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, seperti membuka warung makan, dan meyewakan.

#### **D. Pemerintah Daerah**

Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya dalam Syafiie (2010:11). Selanjutnya, daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh (Nugraha, 2011:14).

C.F Strong (dalam Fahmi, 2012:28) yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok. Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama di dalamnya (Retnami, 2001:8) , yaitu: pertama, pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah; kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 – 2031. Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah. Tujuan Penataan Ruang, Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan pengembangan wilayah berbasis agrobisnis yang berdaya saing secara berkelanjutan dan merata.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud ditetapkan kebijakan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Peningkatan perkembangan ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan pengembangan agropolitan meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri dan jasa;
- b. Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;
- c. Perwujudan pembangunan yang merata dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- d. Perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten;
- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang, strategi untuk peningkatan perkembangan ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan pengembangan agropolitan meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri dan jasa, meliputi:

- a. mempertahankan dan meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sebagai sektor basis perekonomian wilayah Kabupaten Lampung Timur;
- b. mengoptimalkan produksi pertanian yang berbasis agribisnis;

- c. Mengembangkan produksi perikanan tangkap dan budidaya yang terintegrasi dengan kawasan minapolitan;
- d. Mengembangkan pariwisata yang berbasis pada obyek wisata alam dan budaya;
- e. Mengembangkan kawasan industri terpadu dengan mewujudkan industri pengolahan hasil-hasil pertanian sehingga mendorong tumbuhnya kegiatan agroindustri;
- f. Mengembangkan simpul dan pusat-pusat distribusi barang dan jasa dengan mengoptimalkan prasarana wilayah yang ada.

Strategi untuk perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup, meliputi:

- a. Mengendalikan dan memantapkan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, baik untuk melindungi kawasan bawahnya, melindungi kawasan perlindungan setempat, memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora dan fauna dan ekosistemnya, serta melindungi kawasan yang rawan bencana alam;
- b. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan dalam mengupayakan tercapainya kelestarian dan keseimbangan lingkungan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembangunan;
- c. Merencanakan pemantapan kawasan lindung dilakukan dengan melibatkan masyarakat agar berperan aktif dalam pengawasan dan pengendalian kawasan lindung;
- d. Mengendalikan pencemaran serta pembatasan aktivitas pertambangan pada kawasan pesisir; dan
- e. Menjaga kelestarian biota laut dan mengendalikan fungsi lindung kawasan pantai timur.

Strategi perwujudan pembangunan yang merata dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah, meliputi:

- a. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah;
- b. Menciptakan sistem pelayanan umum sosial dan ekonomi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat;
- c. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar dapat kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya; dan
- d. Mendorong perkembangan kawasan agar lebih mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah terutama dalam membuka daerah yang terisolir dan mencukupi kebutuhan wilayah yang bertetangga.

#### **E. Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)**

Menurut Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan mendefinisikan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Fauzi. 2004:28). Sedangkan Soemarwoto (2006:29) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang mengharapkan adanya keseimbangan sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah konsep pembangunan yang menawarkan pembangunan yang bersifat ajek yang mampu mencapai kesejahteraan masyarakat, konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi konsep yang populer dan fokus dunia internasional sejak dipertegasnya pendekatan ini pada KTT Bumi di Rio de Jenairo pada tahun 1992 (Akhmat, 2014:68).

Hampir seluruh negara kemudian menggunakan pembangunan berkelanjutan sebagai jargon pembangunannya. Pembangunan berkelanjutan disepakati sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan-kebutuhan generasi yang akan datang. Di dalamnya terkandung dua gagasan penting: (a) gagasan “kebutuhan” yaitu kebutuhan esensial untuk memberlanjutkan kehidupan manusia, dan (b) gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan (Akhmat, 2014:82).

Konsepsi pembangunan berkelanjutan sendiri ditopang dengan tiga pilar utama yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan, (Burhanuddin, 2016:11). Ketiga konsepsi ini sendiri merupakan sebuah konsepsi mutlak yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah pembangunan yang berkelanjutan sehingga untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, tentu perlu ada terlebih dahulu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan ekologi, (Hanley, 2001:5). Ketiga sektor tersebut harus saling bersinergi dan membangun sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi tersebut dapat dicapai dengan dilakukannya pembangunan hukum untuk menciptakan sebuah pembangunan yang *holistic*.

Tiga aspek pembangunan berkelanjutan :

1. Aspek ekonomi, diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinyu untuk memelihara keberlanjutan pembangunan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi dan industri
2. Aspek sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.
3. Aspek lingkungan yakni pembangunan harus mampu menghindari eksploitasi, serta mampu memelihara sumber daya yang stabil, fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara dan fungsi



ekosistem lainnya yang tidak termasuk katagori sumber ekonomi.

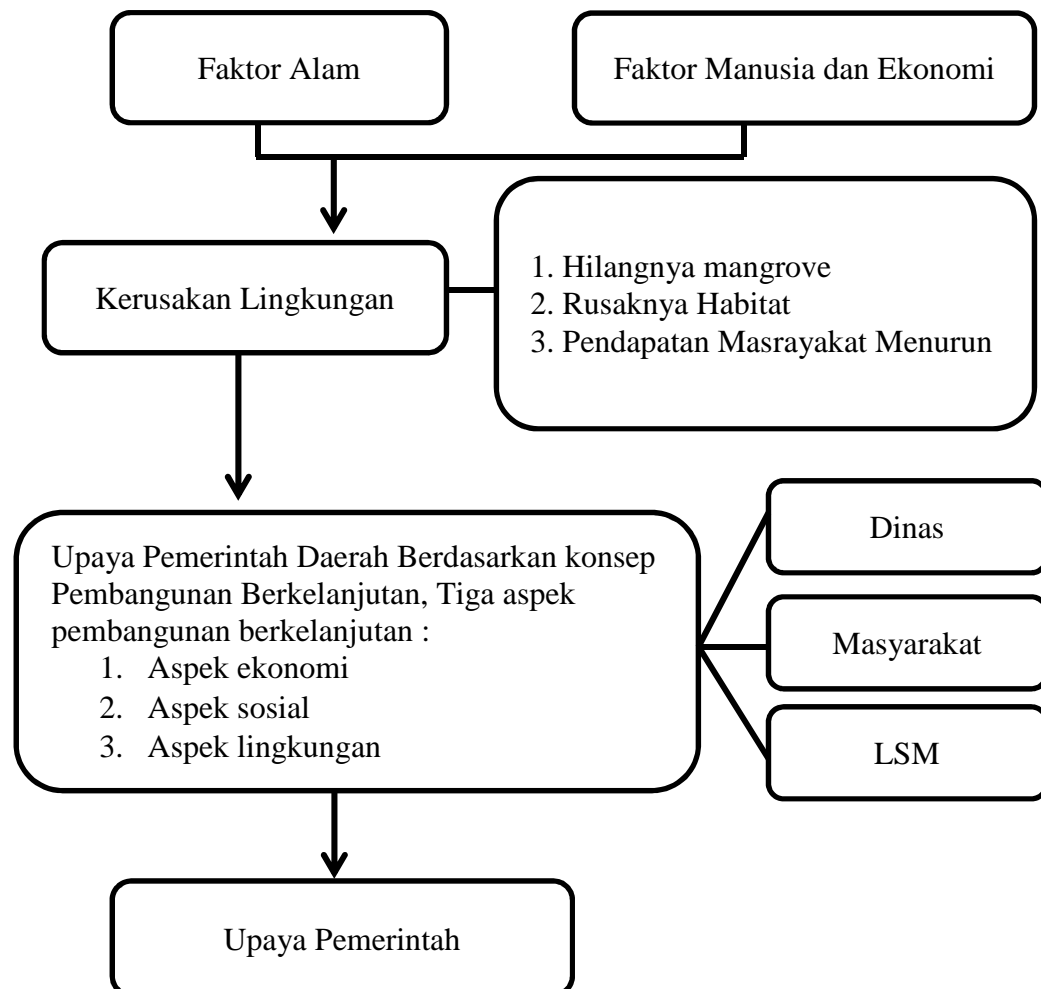
Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan berkelanjutan bersifat jangka panjang antar generasi. Artinya tidak hanya mementingkan antar kelompok dalam sebuah generasi, tapi harus ada pemerataan antar generasi. Hal ini, mengisyaratkan bahwa suatu generasi tidak boleh menghabiskan sumberdaya alam yang ada dan tidak menyisakan bagi kepentingan generasi yang akan datang baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.

Menurut Wheeler dan Beatley (dalam Grece 2013:3) terdapat tiga pilar yang mendukung sifat berkelanjutan, yang saling berinteraksi satu sama lain, seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Kebutuhan manusia disebut berkelanjutan jika kebutuhan standar bisa didapatkan dalam waktu yang panjang. Kebutuhan standar yang dimaksud meliputi udara, air, dan sumber daya alam lainnya. Dengan demikian lingkungan dapat memberi kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk sosial (*bearable*). Kebutuhan dasar manusia terhadap ekonomi disebut berkelanjutan jika memiliki kesamaan kesempatan (*equitable*) untuk mendapat pemenuhan kebutuhan. Sedangkan kebutuhan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan tidak lepas dari ketersediaan lingkungan, seperti udara, air, tanaman, hewan dalam waktu yang lama (*viabel*).

## **F. Kerangka Pikir**

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kerusakan lingkungan yang terjadi dikarenakan oleh pengalihan fungsi lahan. Akibat alih fungsi lahan tumbuhan bakau yang dijadikan tambak udang di Kecamatan Labuhan Maringgai, sekarang lahan tersebut rawan terjadinya bencana alam seperti erosi. Sehingga tambak udang yang ada di lahan tersebut gagal panen dan membuat perekonomian masyarakat di wilayah terkena erosi menjadi terganggu.

Melihat permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan. Konsepsi pembangunan berkelanjutan sendiri ditopang dengan tiga pilar utama yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan (Burhanuddin, 2016:11). Ketiga konsepsi ini merupakan sebuah konsepsi mutlak yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah pembangunan yang berkelanjutan sehingga untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, tentu perlu ada terlebih dahulu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan ekologi (Hanley, 2001:5). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir di bawah ini:



**Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir**

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Creswell dalam Raco (2010:7) adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sesuatu masalah aktual, tanpa menarik kesimpulan. Jenis penelitian ini lebih banyak melakukan analisis deskriptif serta tidak menguji hipotesis. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menemukan, memahami dan menjelaskan tentang bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mengatasi kerusakan lingkungan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan, serta dianalisis dengan rinci berdasarkan informasi dan informan.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam mengatasi kerusakan lingkungan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan. Upaya Pemerintah Daerah Berdasarkan konsep Pembangunan Berkelanjutan, Tiga aspek pembangunan berkelanjutan (Burhanuddin, 2016:11) :

1. Aspek ekonomi, diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinyu untuk memelihara keberlanjutan pembangunan dan menghindari terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi dan industri.

2. Aspek sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, menyediakan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.
3. Aspek lingkungan yakni pembangunan harus mampu menghindari eksploitasi, serta mampu memelihara sumber daya yang stabil, fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk katagori sumber ekonomi.

Ketiga konsepsi ini sendiri merupakan sebuah konsepsi mutlak yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah pembangunan yang berkelanjutan sehingga untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, tentu perlu ada terlebih dahulu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan ekologi (Hanley, 2001:5).

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana Peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat (Moleong, 2011:28). Lokasi dalam penelitian ini terletak di Desa Bandar Negeri, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Peneliti memilih Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai karena di daerah tersebut rawan terjadinya abrasi pantai. Pada tahun 2020 telah terjadi abrasi di wilayah Kecamatan Labuhan Maringgai. Dampak pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak (Abrasi), belasan hektare tambak di Desa Bandar Negeri, tersapu gelombang dan mengakibatkan tambak-tambak tersebut tidak lagi produktif.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang digunakan dalam komunikasi langsung yang berbentuk sejumlah pertanyaan lisan yang diajukan penelitian ini, melakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dari informan terkait dengan fokus penelitian, sehingga sasaran yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data. Peneliti melakukan wawancara berdasarkan panduan wawancara yang telah dibuat. Panduan wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian agar wawancara terarah dan tidak menyimpang (Silaen dan Widiyono, 2013:153).

Tabel 4. Informan

| No | Nama           | Jabatan                        | Instansi                    |
|----|----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Feri Suhendri  | Kabid Penataan dan Peningkatan | Dinas Lingkungan Hidup      |
| 3  | Agustinus TH   | Sekretaris Camat               | Kecamatan Labuhan Maringgai |
| 4  | Arif Kurniawan | Anggota                        | Komunitas Pegiat Mangrov    |
| 5  | Triyono        | Kepala Desa Bandar Negeri      | Tokoh Masyarakat            |
| 6  | Suryadi        | Tokoh Agama Desa Bandar Negeri | Tokoh Masyarakat            |
| 7  | Maryanto       | Yang Dituakan                  | Tokoh Masyarakat            |
| 8  | Marsan         | Pengusaha Tambak               | -                           |

##### 2. Observasi

Penelitian dilakukan dengan meneliti secara langsung ke instansi untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dalam observasi ke lapangan peneliti dapat melakukan pencatatan tentang gambaran apa yang sudah diamati di lokasi penelitian. Observasi digunakan untuk mengamati hal-hal yang tidak didapatkan ketika proses wawancara sedang berlangsung. Dengan

menggunakan observasi peneliti dapat langsung mengamati data-data diluar wawancara sebagai penunjang data primer. Observasi yang dilakukan peneliti adalah peneliti mengunjungi Desa Bandar Negeri dan desa lainnya yang ada di Kecamatan Labuhan Maringgai dan melihat terdapat abrasi pantai, mangrov yang sudah ditanam dan dinding pantai.

### 3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam teknik penelitian ini adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Studi dokumentasi digunakan untuk penunjang serta melengkapi data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara. Peneliti menggunakan studi dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang riil bahwa peneliti telah benar-benar melakukan penelitian ke lokasi penelitian. Studi dokumentasi digunakan sebagai acuan peneliti berupa fenomena yang diabadikan untuk jangka waktu yang lama. Dokumentasi yang peneliti lakukan adalah dengan mengumpulkan data berupa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, data luas mangrov Kabupaten Lampung Timur dan foto dokumentasi penanaman mangrov dan pembuatan dinding pantai.

## **E. Teknik Pengolahan Data**

Peneliti memperoleh sejumlah data dari lapangan, sehingga peneliti dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Editing data

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Pada tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak relevan harus disingkirkan. Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian dengan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai

dengan kaidah sebenarnya. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses ini peneliti lakukan dengan memilah data yang diperoleh dari hasil wawancara. Kata kata yang tidak baku dan diluar konteks peneliti pilah dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## 2. Interpretasi

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan focus penelitian. Hasil wawancara biasanya masih mengandung makna yang ambigu atau sulit untuk di jelaskan. Sehingga peneliti memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2014:246). Penelitian ini menggunakan tiga kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:7), yaitu:

### 1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data yang dianggap relevan yang telah didapat dari hasil penelitian. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam menganalisis data yang terkumpul dari catatan yang didapat di lapangan. Peneliti mengumpulkan data mengenai sosialisasi dan perlindungan anak korban kekerasan.

### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah kumpulan data yang diperoleh yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data dalam penelitian ini peneliti menyajikan data yang di peroleh dari penelitian yang disajikan dalam bentuk teks naratif. Peneliti menyajikan data yang telah direduksi.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisa data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan.

## **G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. (Moloeng, 2004:178) menjelaskan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Ada tiga triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu:

1. Triangulasi pengamat, yaitu adanya pengamat di lokasi penelitian.
2. Triangulasi teori, yaitu peneliti menggunakan berbagai teori yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini beberapa teori yang digunakan akan terlihat dalam bab pembahasan untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.
3. Triangulasi metode, yaitu menggunakan metode seperti wawancara dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berkaitan dengan tujuan penelitian.



#### **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **1. Kabupaten Lampung Timur**

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro, diresmikan pada tanggal 27 April 1999, dengan ibu kota di Sukadana. Pada waktu awal terbentuknya, Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa. Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, 2 (dua) kecamatan pembantu yaitu kecamatan pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian wilayah Kabupaten Lampung Timur bertambah 2 (dua) kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif dan 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (sebelas) kecamatan di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Sehingga sejak Tahun 2012 Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 Kecamatan definitif dan 264 desa. Sebagaimana kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Lampung Timur pun memiliki seloka yaitu Bumei Tuwah Bepadan, yang mengandung arti bahwa daerah Lampung Timur merupakan daerah yang selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakat apabila segala keputusan diambil melalui cara musyawarah untuk mufakat. Seloka ini tercantum dalam lambang daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2000 tentang Lambang Daerah.

Pada umumnya wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah yang datar dengan sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 25-55 meter di atas permukaan laut (mdpl), kecuali Kecamatan Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Braja Selehah, dan Bumi Agung yang hanya berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan sebaran tingkat kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari kelas lereng datar (kelerengan 1-3%) yaitu seluas 96.627 hektar, kelas lereng landai (3- 8%) yaitu seluas 198.248 hektar, kelas lereng bergelombang (8-15%) yaitu seluas 213.911 hektar, dan kelas lereng berbukit (15-40%) yaitu seluas 16.039 hektar.

Wilayah Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam klasifikasi kemampuan lahan sangat baik (kelas 1) seluas 88.308,39 hektar atau 16,58% dari luas wilayah yang meliputi Kecamatan Batanghari, Braja Selehah, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Marga Sekampung, Margatiga, Mataram Baru, Melinting, Pasir Sakti, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Waway Karya, dan Way Bungur. Tidak menutup kemungkinan bagi kelas 1 diperuntukan bagi aktivitas budidaya pertanian lahan basah atau sawah karena faktor ketersediaan air yang banyak dan tingkat drainasenya terhambat sehingga kebutuhan air untuk areal persawahan dapat terpenuhi dengan maksimal. Namun bila diperuntukan bagi aktivitas perindustrian, perlu dipertimbangkan faktor kemampuan lahannya, antara lain faktor kesetabilan lereng dan tingkat erosivitas lahan.

Daerah dengan klasifikasi kemampuan lahan baik (kelas 2) dengan beberapa faktor penghambat. Keterbatasan kondisi fisik alam yang terjadi kendala antara lain tingkat erosifitasnya yang lebih peka dibandingkan dengan kelas kemampuan lahan yang rendah. Luas wilayah dengan kriteria lahan baik adalah 101.859,32 hektar setara dengan 19,13% luas wilayah kabupaten Lampung Timur yang meliputi Kecamatan Bandar Sribhawono, Bumi Agung, Jabung, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Margatiga, Melinting, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana dan Way Jepara. Lahan kelas 2 masih dapat digunakan untuk menampung aktifitas manusia tetapi bagi aktivitas budidaya pertanian perlu

adanya sedikit usaha untuk intensifikasi (mekanisasi pertanian) untuk meminimalisasi faktor pembatas tersebut. Namun bila faktor pembatas tersebut diabaikan, pada umumnya tidak berakibat fatal terhadap aktifitas lainnya.

Kabupaten Lampung Timur dengan tingkat klasifikasi kemampuan lahan sedang (kelas 3) seluas 70.411,50 hektar (13,22% dari luas wilayah) terdapat di Kecamatan Bandar Sribhawono, Batanghari, Batanghari Nuban, Gunung Pelindung, Labuhan Ratu, Mataram Baru, Metro Kibang, Pekalongan Purbolinggo, Waway Karya dan Way Bungur. Faktor pembatas yang dihadapi cenderung lebih banyak, sehingga perlu penanganan terlebih dahulu sebelum melakukan budidaya pertanian. Faktor pembatas tersebut diantaranya tingkat erosivitas yang cenderung peka dan tingkat drainasenya agak cepat, bila digunakan untuk budidaya lebih sesuai untuk tanaman perkebunan karena tidak membutuhkan air yang cukup banyak. Selain itu, dengan adanya tanaman keras dapat untuk membantu menopang badan tanah sehingga efek erosi tanah dapat ditekan.

Klasifikasi kemampuan lahan jelek (kelas 4) memiliki banyak pembatas alam diantaranya tanah yang lebih bersifat peka terhadap erosi, tingkat drainase tanah tinggi, kesetabilan tanah mulai berkurang (agak stabil), dan ketersediaan airnya sedikit, sehingga apabila dipergunakan untuk kawasan permukiman atau aktifitas selain budidaya pertanian akan beresiko tinggi. Wilayah di Kabupaten Lampung Timur yang termasuk dalam kriteria ini adalah kecamatan Batanghari, Batanghari Nuban, Braja Selehah, Bumi Agung, Jabung, Labuhan Maringgai, Mataram Baru, Marga Sekampung, Marga Tiga, Melinting, Metro Kibang, Pekalongan, Purbolinggo, Raman Utara, Sekampung, Sekampung Udik, Sukadana, Waway Karya, Way Jepara, dan Way Bungur, total luasnya mencapai 230.548,04 hektar atau 43,30% dari luas wilayah kabupaten.

Sedangkan sisanya, 7,77% dari luas wilayah Kabupaten Lampung Timur setara dengan 41.375,76 hektar merupakan lahan dengan klasifikasi kemampuan lahan amat jelek (kelas 5) dicirikan dengan besarnya jumlah faktor penghambat

sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan sebagai areal budidaya. Faktor penghambat yang berpengaruh antara lain morfologi lereng yang relative curam dan tidak stabil sehingga tingkat drainasenya cepat dan apabila diterpa hujan yang cukup deras dapat menyebabkan erosi. Di samping itu, tingkat drainase yang cepat menyebabkan tanah tidak sempat menyimpan air. Wilayah dengan klasifikasi amat jelek dapat dijumpai dikecamatan Bandar Sribhawono, Batanghari Nuban, Gunung Pelindung, Jabung, Labuhan Maringgai, Labuhan Ratu, Marga Sekampung, Margatiga, Mataram Baru, Melinting, Sekampung, Sekampung Udik, dan Sukadana. Kawasan eksklusif adalah Taman Nasional Way Kambas.

## **2. Kecamatan Labuhan Maringgai**

Sampai dengan tahun 2017, Kecamatan Labuhan Maringgai terdiri dari 11 desa 96 dusun dan 387 RT. Seluruh desa di kecamatan ini berstatus desa swasembada. Pada tahun 2017 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Labuhan Maringgai tercatat sebanyak 15 yang terdiri dari 12 laki-laki dan 3 perempuan. PNS di kantor kecamatan berjumlah 13 pegawai, sedangkan 2 pegawai lainnya tersebar di kantor desa. PNS di Kecamatan Labuhan Maringgai 51 persen berpendidikan Sarjana dan 49 persen berpendidikan SMA. Sedangkan berdasarkan golongan kepangkatan, 3 pegawai bergolongan III, 9 pegawai bergolongan II, dan lainnya bergolongan IV. Seluruh perangkat desa di Kecamatan Labuhan Maringgai berjumlah 173 orang yang terdiri dari 11 kepala desa, 33 sekretariat desa, 33 kaur/kasi, dan 96 kepala dusun.

Penduduk Kecamatan Labuhan Maringgai berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 72.192 jiwa yang terdiri atas 37.292 jiwa penduduk laki-laki dan 34.900 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kecamatan Labuhan Maringgai mengalami pertumbuhan sebesar 1,01 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Desa Labuhan Maringgai sebesar 1,10 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk lakilaki terhadap penduduk perempuan sebesar 106.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Labuhan Maringgai tahun 2017 mencapai 500 jiwa/km .

Kepadatan Penduduk di 11 desa cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Muara Gading Mas dengan kepadatan sebesar 1.585 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Desa Sukorahayu sebesar 308 jiwa/km<sup>2</sup> . Berdasarkan data registrasi, selama tahun 2017 di Kecamatan Labuhan Maringgai terdapat 23 peristiwa kelahiran, 23 kematian, 34 migrasi masuk, dan 43 migrasi keluar. Peristiwa migrasi masuk terbesar terjadi di Desa Labuhan Maringgai sebanyak 109 peristiwa. Sedangkan migrasi keluar terbesar terjadi di Desa Muara Gading Mas sebanyak 109 peristiwa. Menurut sumber penghasilan utama penduduk Kecamatan Labuhan Maringgai, sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak digeluti penduduk tahun 2017 yaitu sebesar 50,23 persen.

Luas lahan pertanian di Kecamatan Labuhan Maringgai mencapai 2.798 hektar lahan pertanian sawah dan 4.434 hektar lahan pertanian non sawah. Luas lahan sawah didominasi oleh sawah irigasi (70%) dibandingkan dengan non irigasi. Sedangkan luas lahan pertanian non sawah yang paling besar adalah lahan tegal/kebun yang mencapai 59 hektar. Tahun 2017 produksi padi di Kecamatan Labuhan Maringgai mencapai 573.888 ton dari luas panen 112.750 hektar. Sedangkan Produksi tanaman palawija yang terbesar adalah produksi ubi kayu yang mencapai 1.224.711 ton dengan luas panen 48.092 hektar. Produksi tanaman sayuran terbesar di Kecamatan Labuhan Maringgai tahun 2017 adalah cabai yang mencapai 15.083 kuintal. Untuk tanaman buah buahan, produksi terbesar adalah pepaya yang mencapai 20.000 kuintal. Sedangkan Produksi komoditas perkebunan terbesar adalah kelapa yang mencapai 15.083 kuintal.

### **3. Desa Bandar Negeri**

Kondisi Biofisik dan Tata Guna Lahan Desa Bandar Negeri terletak di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung. Desa ini memiliki luas ±.702 hektar. Desa yang terdiri dari 2 dusun ini berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Utara : Desa Muara Gading

Mas b. Sebelah Selatan : Desa Karya Makmur. Desa yang berada pada ketinggian,5 mdpl ini memiliki suhu rata-rata harian,5 0 C dengan bentang wilayah yang datar. Merupakan salah satu desa pantai Desa Bandar Negeri memiliki bentuk tekstur tanah pasir, dengan warna tanah sebagian besar adalah abu-abu.. Menurut penggunaannya, lahan di Desa Bandar Negeri terdiri dari jalan, sawah dan ladang, bangunan umum, empang, pemukiman/perumahan, jalur hijau, dan pemakaman.

Mata Pencaharian Sebagian besar penduduk Desa Bandar Negeri bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan lainnya bermata pencaharian sebagai karyawan, wiraswasta/pedagang, pertukangan, buruh tani, pengrajin, peternak, dan montir. Monografi Desa Bandar Negeri Suku dan Agama Penduduk Desa Margasari terdiri dari bermacam-macam suku yaitu Jawa, Bugis, Madura, Sunda, dan Padang. Mayoritas penduduk Desa Bandar Negeri bersuku Jawa. Bahasa pergaulan sehari-hari yang digunakan adalah Bahasa Indonesia. Hampir seluruh penduduk Desa Bandar Negeri beragama Islam.

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak yang dilakukan oleh masyarakat menyebabkan terjadinya abrasi. Abrasi atau erosi adalah kerusakan garis pantai akibat dari terlepasnya material pantai, seperti pasir atau lempung yang terus menerus di hantam oleh gelombang laut atau dikarenakan oleh terjadinya perubahan keseimbangan angkutan sedimen di perairan pantai atau hilangnya daratan di wilayah pesisir. Dalam hal ini, upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan membuat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam mengatasi kerusakan di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu:

1. Aspek ekonomi, dalam mengatasi kerusakan lingkungan upaya pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur di lihat dari RENJA SKPD, pemerintah tidak memiliki program dalam aspek ekonomi.
2. Aspek sosial, dalam mengatasi kerusakan lingkungan upaya pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur di lihat dari RENJA SKPD, pemerintah telah melakukan upaya sosialisasi tentang gerakan peduli lingkungan. dalam RENJA tersebut pemerintah memberikan

upaya pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah.

3. Aspek lingkungan, dalam mengatasi kerusakan lingkungan upaya pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur di lihat dari RENJA SKPD, pemerintah sudah membuat program dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Berdasarkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mengatasi kerusakan lingkungan akibat konversi lahan mangrove menjadi tambak udang belum maksimal. Dari hasil penelitian kerusakan yang terdapat di Desa Bandar Negeri belum teratasi hingga saat ini tahun 2022. Program yang dibuat di dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur tahun 2021 belum di laksanakan di Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tentang Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Kerusakan Lingkungan Akibat Konversi Lahan Mangrove Berdasarkan Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Studi Di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur), maka saran dari peneliti adalah dalam mengatasi abrasi atau kerusakan lingkungan bisa dilakukan dengan merealisasikan program yang sudah dibuat dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur. Pada aspek ekonomi, pemerintah harus membuat kebijakan atau aturan yang berisi tentang pemulihan lingkungan oleh pemanfaatan lingkungan tersebut. Untuk memulihkan kembali lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, profit pemanfaatan potensi ekonomi sumberdaya dan potensi sumberdaya alam dikembalikan kepada biaya jasa lingkungan untuk peletariannya, sehingga daya dukung dan daya tampung dapat pulih kembali.



## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arsyad, S dan Rustiadi, E. 2008. *Penyelamat Tanah, Air, dan Lingkungan*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Edi Suharto, 2007. *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabet.
- Faisal Akbar, 2003. *Dimensi Hukum dalam Pemerintahan Daerah*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Fauzi, A, 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta. Gramedia.
- G. Setya Nugraha, R. Maulina f, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya.
- Gianfranco Poggi. 1992. *The Development of the Modern State "Sociological Introduction*, California: Standford University Press.
- Harum .M.Husein 1995. *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*. Jakarta. Bumi Angkasa.
- Inu Kencana Syafie, 2010. *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama.
- Kordi, K.M.G.H.2012. *Ekosistem Mangrove, Fungsi, Potensi, dan Pengelolaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Daud Silalahi, 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung. Penerbit Alumni.
- Mulyanto. 2007. *Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- N.H.T.Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Pande Made Kutanegara.2004. *Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- P. Joko Subagyo, 2002. *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangan)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Pearce, D.W. dan R.K. Turner. 1990. *Economics of Natural Resources Environment*. London: Harvester Wheatsheaf.

- Retnami, Setya. 2001. *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.
- Sentanoe Kertonegoro. 1987. *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Cet, II . Jakarta. Mutiara Sumber Widya.
- Soegianto, Agoes, 2012. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Soemardi. 2010. *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Bandung Bee Media Indonesia.
- Soemarwoto, Otto, 2001. *Ekologi Lingkungan Hidup*. Jakarta. Djembatan.
- Soemarwoto, Otto, 2005. *Ekologi Lingkungan Hidup*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sunarno, Siswanto, 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Utomo. 1992. *Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan*. Lampung: Universitas Lampung
- Zoer'aini, Jalam, 2009. *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia, Siapa bisa Menghentikan Penyulutnya?* Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Jurnal :
- Adol Frian Rumaijuk. 2020. *Analisis Prospek Usaha Budidaya Udang Vannamei Di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Darma Agung, Medan.
- Akhmad, Abdul Gani. 2011. *Dampak Pengembangan Lokasi Perumahan Rumah Sederhana Sehat Terhadap Kehidupan Ekonomi Petani Di Pinggiran Kota Palu.Ruang*. [Online] 3 (1), 63-70. Tersedia di: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/RUANG/article/download/738/636>
- Akhmad Fauzi, Alex Oxtavianus. 2014. *Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 15, Nomor 1.
- Alamendah. 2014. *Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia dan Penyebabnya*. diakses melalui <https://alamendah.org/2014/08/01/kerusakanlingkungan-hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya/>
- Amelia, Amalia. 2020. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Lampung Mangrove Center (Lmc) Di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timu*. JIIA, Volume 8 No. 2.

- Azra, Azyumardi, 2010, "Global Warning dan Kesadaran Peduli Lingkungan", dalam Arif Sumantri. *Kesehatan Lingkungan & Perspektif Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. ). Cet. Ke- 1,
- Burhanuddin.2016. *Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan*, Jurnal EduTech Vol. 2 No. 1.
- Bockish. J. 2012. *Transportation Sustainability Rating Systems*. Gresham Smith and Partners. Presentation. <http://www.gaite.org/wp-content/uploads/2012/07/GAITEPresentation-Sustainability-July-2012.pdf>
- Eka fitrianingsih, 2017, *Tinjauan terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian (permukiman) di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*. Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar.
- Fitria Ulfa, 2017. *Dampak Pengalihan Lahan Mangrove Terhadap Keanekaragaman Benthos di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh*. BIOTIK Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi dan Kependidikan 4(1):41 DOI:10.22373/biotik.v4i1.1069
- Greece Maria Lawalata. 2013. *Prinsip-Prinsip Pembangunan Jalan Berkelanjutan*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Hanif Rachmad Fauzie. 2018. *Peran Pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan di Kabupaten Sidoarjo*.
- Hanley, N., Shogren, J.F. White, B., 2001. *Introduction to Environmental Economics*, England: Oxford University Press.
- Iqbal, Muhammad. 2007. *Alih Fungsi Lahan Sawah dan Strategi Pengendaliannya di Provinsi Sumatera Selatan*. Departemen Pertanian.Laporan nomor: 92.
- Ilham, Nyak., Syaikat, Yusman. & Friyatno, Supena. 2005. *Perkembangan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Serta Dampak Ekonominya*. SOCA (Socio-Economic Of Agriculture And Agribusiness. [Online] 2 (1), 1-25. Tersedia di: <http://library.unud.ac.id/index.php/soca/article/download/4081/3070>
- Muhamad Dio Fabianto. 2014. *Konsep Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Dan Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat*. Jurnal Teknologi.
- Munandar. 2017. *Studi Analisis Faktor Penyebab Dan Penanganan Abrasi Pantai Di Wilayah Pesisir Aceh Barat*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Universitas Teuku Umar. Aceh.
- Nurfadilah, 2017. *Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Pulau Lakkang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- La Ode Bariun, 2015. *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*. Disertasi. Universitas Hasanuddin. Makassar.

- Novita Dinaryanti, 2014, *Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di daerah Sepanjang Irigasi Bendung Colo Kabupaten Sukoharjo*, Jurnal, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang.
- Netty Dahlah Uar, Sigit Heru Murti dan Suwarno Hadisusanto, 2016. *Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Manusia pada Ekosistem Terumbu Karang*, Jurnal MGI, ISSN 0215-1790, Vol 30 No 1.
- Ricardo, Ayub. 2016. *Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat*.
- Rhina, Uchyani F. & Ani, Susi Wuri. 2012. *Tren Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Klaten*. SEPA. [Online] 8 (02), 51-182. Tersedia di: <http://agribisnis.fp.uns.ac.id/wp-content/uploads/2012/10/Jurnal>.
- Slamet Haryono. 2009. *Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan*. Theses.
- Tri Wijayanti, 2007. *Konservasi Hutan Mangrove Sebagai Wisata Pendidikan*. Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan Vol.1 Edisi Khusus
- Vika ,Vitri. 2005. *Identifikasi perubahan areal hutan mangrove terhadap pengembangan wilayah pesisir Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur*. Jakarta. FALTL – Usakti.
- Wa Niat. 2021. *Analisis Keuntungan Usaha Budidaya Tambak Udang Sistem Tradisional Plus Di Desa Towua Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka*. FPIK UHO
- Wheeler, S. and Beatley, T. 2004. “Introduction to Chapter 7” from *Agenda 21 (1192). And the “Istanbul Declaration on Human Settlements”*. *The Sustainable Urban Development Reader. The Routledge Urban Reader Series*. New York, NY.
- Willson, Andrew. 2006. *Forest Conversion and Land Use Change In Rural Northwest Yunnan, China*. Mountain Research and Development, 26 (3), p: 227-236.
- Yuliasamaya. 2014. *Perubahan Tutupan Hutan Mangrove Di Pesisir Kabupaten Lampung Timur (Mangrove Forest Cover Change Along The Coast Of East Lampung Regency)*. Jurnal.
- Yosef Anata Christie, La Sina dan Rika Erawaty, 2013. *Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pembangunan Perumahan (Studi Kasus di Perumahan Palaran City oleh PT Kusuma Hady Property)*, Jurnal Beraja Niti, ISSN 2337-4608, Vol 2 No 11

Website :

<https://alamendah.org/2014/08/01/kerusakanlingkungan-hidup-di-indonesia-dan->

penyebabnya/

<https://www.forestdigest.com/detail/693/mangrove-antara-tambak-udang-dan-kelestarian>

<https://lampung.idntimes.com/news/lampung/silviana-4/waspada-imbis-perubahan-iklim-wisata-laut-di-lampung-terancam-abrasi/3>

<https://koran.tempo.co/read/nusa/110347/abrasi-pantai-timur-lampung-semakin-parah>

Dokumen :

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur nomor 4 tahun 2020 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Timur tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang